

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM NEGARA SUDAN.**

### **A. Profil Negara Sudan**

Republik Sudan ditinjau dari segi geografisnya, merupakan negara terluas di Afrika yang memiliki luas sekitar 2.505.810 km<sup>2</sup>. Terletak di Afrika Utara dan beribukotakan Khartoum. Sudan berbatasan dengan Mesir di utara, Eritrea dan Ethiopia di timur, Kenya dan Uganda di tenggara, Kongo dan Republik Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut. Sudan meliputi daratan yang sangat luas dengan gurun sahara di sebelah utara, daerah pengunungan di wilayah Sudan Timur, dan Barat, serta rawa-rawa dan hutan hujan tropis yang sangat besar di daerah Selatan.

Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Ada dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku dan bahasa. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnis yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52 %, Arab 39 %, Beja 6%, dan lain-lain sebanyak 3 %. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas yang memeluk agama Islam sebesar 70%, sebanyak 5% memeluk agama Kristen yang kebanyakan berdomisili di wilayah selatan Sudan, sementara 25 % penduduk lainnya masih memegang teguh kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab, selain itu masih ada juga penduduk yang menggunakan bahasa asli masing – masing suku seperti Nubian, Beja, Ta Bedawia, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotia dan Nilo.

Hamitic. Populasi penduduk Sudan hingga Juli 2008 diperkirakan sebesar 45.047.502 jiwa.<sup>27</sup>

Sudan merupakan negara multi agama dan multi etnis yang memiliki perbedaan kelas sosial ekonomi antara kaum Arab dan Afrika. Sudan atau dalam bahasa Arab “*Bilad as Sudan*” memiliki nama resmi yaitu Republik Sudan, saat ini dipimpin oleh Presiden Omar Hassan Al Bashir sejak 30 Juni 1989. Sejak meraih kemerdekaannya dari penjajahan Mesir dan Inggris pada 1 Januari 1956, Sudan dilanda oleh berbagai macam krisis. Pembagian wilayah negara yang dilakukan oleh Inggris melalui kebijakannya saat itu telah menyebabkan diintegrasikan yang besar di dalam negara Sudan itu sendiri, yang kemudian menjadi awal dari berbagai konflik internal yang terjadi di wilayah tersebut.

Sistem politik dan pemerintahan Sudan mengalami berbagai macam perubahan seiring dari waktu ke waktu.<sup>28</sup> Presiden Sudan adalah pemegang otoritas sistem pemerintahan Executive, yang juga merupakan perdana menteri, kepala pemerintahan, dan panglima angkatan bersenjata. Badan legislatif Sudan adalah *The National Assembly* merupakan majelis rendah yang memiliki 450 anggota. Selain itu juga ada majelis tinggi, yaitu *Council of State*, yang terdiri dari dua wakil yang ditunjuk dari setiap 26 provinsi. Pada bidang peradilan, Sudan memiliki pengadilan tinggi, Menteri Kehakiman, pengacara umum, dan pengadilan umum atau khusus. Di bidang divisi sub administratif, tiap provinsi

---

<sup>27</sup>. CIA fact book: Sudan Country profile. <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. Diakses tanggal 3 Februari 2012 .

<sup>28</sup>. PROFIL SUDAN. <http://www.kemlu.go.id/dokumentasi/Bagan/CountryProfile.aspx?IDB=2&mid>

dikepalai oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden bersama dengan kabinet negara dan majelis legislatif negara.

## **B. Gambaran Umum Konflik Sudan Selatan - Sudan Utara**

Perpecahan internal yang terjadi di Sudan ada beberapa. Krisis Darfur yang terjadi sejak 2003 menjadi konflik internal mendapat banyak kecaman dari masyarakat internasional dan terkenal dengan Genocide Darfur, dimana pokok permasalahannya terletak pada meningkatnya gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan pusat Omar Al-Bashir. Pembersihan etnis terjadi, menghasilkan ratusan ribu warga meninggal, serta jutaan mengungsi ke negara tetangga. Dan konflik antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara, dimana Sudan Selatan yang merasa sebagai bagian dari negara Sudan kurang mendapatkan hak – hak mereka dan merasa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan yang berada di Sudan Utara. Ketidakadilan tersebut mulai dari segi politik dan ekonomi, Sudan Selatan sering tidak dianggap dalam setiap keputusan politik yang diambil serta adanya diskriminasi dalam pembagian alokasi perekonomian ke daerah tersebut, menyebabkan ketidaksetaraan lapangan pekerjaan dan perkembangan daerah. Sering pula terjadi eksploitasi di daerah Sudan Selatan oleh pemerintah pusat.

Konflik - konflik yang terjadi di Sudan ini merupakan bagian dari warisan kolonial, dimana pada tahun 1924 terjadi konflik antara selatan dan utara yang disebabkan oleh dijalankannya kebijakan pemisahan Sudan oleh Inggris yang kemudian terbukti menjadi salah satu sumber konflik di masa sekarang. Kebijakan ini dibuat oleh Inggris untuk memisahkan Sudan Selatan yang mayoritas beragama

Kristen dan Animisme dan Sudan Utara yang mayoritas berpenduduk muslim. Penduduk wilayah utara tidak boleh berpindah ke wilayah selatan dan dan Sudan Utara yang mayoritas berpenduduk muslim. Penduduk wilayah utara tidak boleh berpindah ke wilayah selatan dan begitu juga sebaliknya.<sup>29</sup> Kebijakan yang digunakan oleh Inggris ini, dikatakan sebagai bentuk usaha pencegahan terjadinya penyebaran Malaria akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Inggris ingin mendukung misionaris di Sudan Selatan dan menghalangi penyebaran Islam dan tradisi muslim di daerah Sudan Selatan. Tidak hanya itu, Inggris pun membangun pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syaikh di Utara dengan memfokuskan perkembangan di wilayah Sudan Selatan dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan. Pada saat penjajahan Inggris tersebutlah, wilayah Sudan di Selatan mulai dieksploitasi dan diadakannya kebijakan pemisahan antara Sudan Selatan dan Sudan Utara yang dilakukan oleh Inggris hingga terus menimbulkan konflik – konflik berkepanjangan di wilayah negara itu.

Kemerdekaan di tahun 1956 yang diberikan Inggris memberikan harapan besar bagi rakyat Sudan Selatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari segi pendidikan, politik, ekonomi, serta perkembangan yang merata. Akan tetapi sejak kemerdekaan tersebut, konflik Sudan menjadi semakin berlarut – larut dan menjadi konflik terpanjang di wilayah tersebut. Dimana walaupun setelah kemerdekaan didapatkan oleh Sudan, akan tetapi diskriminasi antara Utara dan Selatan masih terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebudayaan dan

---

<sup>29</sup>. Maklumat Politik Sudan, <http://bizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2012.

keagamaan dan juga masih adanya aplikasi dari kebijakan yang dibuat Inggris sebelumnya serta adanya kebijakan Pemerintahan pusat yang terus menerus mengaplikasikan program perkembangan ekonomi regional tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan Selatan untuk berkembang dan hal tersebut semakin memperburuk keadaan dan juga semakin buruknya diskriminasi yang terjadi. Dan adanya perfektif bahwa Sudan Utara ingin menguasai Sudan secara keseluruhan yangmana pada akhirnya hal tersebut ditanggapi dengan serius oleh semua rakyat di wilayah Sudan Selatan dan menyebabkan terjadinya pergerakan yang melawan pemerintah pusat. Akan tetapi kemudian yang dikatakan merefleksikan kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah adanya penyebaran agama Islam di negara tersebut. Dan muncul beberapa usaha pemerintah untuk menerapkan hukum Syariah, sebuah hukum yang menggunakan hukum agama Islam sebagai pedoman. Tentunya ini ditanggapi dengan penuh kemarahan oleh rakyat Sudan Selatan, dan semua penduduk Sudan yang beragama Kristen. Bukan hanya itu, penyebaran ini dilakukan dengan memaksa semua rakyat menerima hukum tersebut.

Masyarakat yang merasa tertindas, terutama dalam hal kebebasan agama, serta kesempatan dalam kontribusi ekonomi negara yang tidak merata akhirnya menyebabkan perang sipil selama bertahun-tahun di Sudan. Perang saudara pertama sangat berbeda dari yang kedua. Perang Sipil pertama pada tahun 1955-1972, dilanjut pada perang sipil kedua tahun 1983-2005 yang merupakan perang Sipil paling lama, serta paling banyak menelan korban.

## 1. Perang sipil pertama (1955-1972)

Perbedaan antara Sudan Selatan dan Utara sebenarnya berawal dari masa penjajahan Mesir di Sudan pada abad ke-19. Dimana warga berkulit hitam seringkali dijadikan sebagai budak dan adanya perbedaan jarak kesetaraan hak antara warga Arab dan kulit hitam yang kemudian diperlebar setelah masa penjajahan Inggris dan Mesir, dimana diskriminasi tersebut terus-menerus berlanjut. Setelah Februari 1953, diputuskan bahwa Sudan berhak atas kemerdekaan yang sebenarnya bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya untuk Sudan tetapi Mesir dan Inggris hanya menyepakati pemberian hak untuk mengatur pemerintahan sendiri. Hal ini dilanjutkan oleh transisi kekuasaan pertama melalui pemilihan anggota parlemen tahun 1954.<sup>30</sup> Dan adanya anggota *Liberal Party* yang terpilih dalam parlemen tersebut, berusaha untuk mengusulkan sebuah pemerintahan federal, yang memberikan Sudan Selatan administrative yang berbeda dari Sudan Utara. Hal tersebut merupakan upaya Sudan Selatan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar tidak diskriminatif dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakatnya yang berada di Sudan Selatan. Usulan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif oleh anggota parlemen lainnya. Namun ternyata tanggapan positif tersebut hanya sebagai janji yang tidak mungkin terealisasi. Banyaknya posisi – posisi penting di pemerintahan pusat serta posisi-posisi tinggi daerah di Sudan Selatan banyak dijabatani oleh warga Sudan Utara. Hingga dari sini berawalanya banyak kecurigaan bahwa pemerintahan yang baru saja terbentuk tersebut berusaha untuk menguasai Sudan

---

<sup>30</sup>. Sudan – First Civil War, [www.globalsecurity.org/military/world/sudan/civil-war1.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/sudan/civil-war1.htm)

secara keseluruhan. Dimana semua jabatan tinggi di level nasional seperti di dalam militer, administrasi, serta kepolisian diduduki oleh warga negara Sudan Utara.

Gerakan – gerakan separatis untuk mendapatkan kesetaraan politik dan untuk mengatasi kemungkinan pemerintahan yang hanya dikendalikan oleh warga negara yang berasal Sudan Utara. Gerakan - gerakan tersebut berusaha menentang sistem pemerintahan yang diterapkan pada saat itu dan berharap agar aspirasi mereka akan pemerintahan federal dapat didengar dan diterapkan. Hingga awal mula konflik yang terjadi pada 18 Agustus 1955 dimana sebuah unit militer yang bernama Equatoria Corps atau lebih dikenal dengan gerakan The Torit Mutiny yang terdiri atas warga negara Sudan Selatan, menolak untuk mematuhi perintah dari pemerintah saat itu.<sup>31</sup> Inggris yang sangat itu masih menancapkan pengaruhnya di wilayah tersebut merasa tidak mampu untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi, sehingga memiliki insentif yang besar untuk memberikan Sudan kemerdekaannya.

Kemerdekaan yang diberikan oleh Inggris tersebut diharapkan dapat menjadikan Sudan bersatu, tetapi yang terjadi. Dimana Sudan Selatan tidak menginginkan atau mendukung kesatuan politik dengan Sudan Utara dari awal kemerdekaan yang diberikan Inggris. Gerakan pemberontakan dari *The Torit Mutiny* yang terjadi pada tahun 1955 masih dalam skala kecil dan tidak membawa dampak atau perubahan yang signifikan di Sudan, namun gerakan tersebutlah yang memberikan inspirasi bagi penduduk negara Sudan di bagian Selatan untuk

---

<sup>31</sup> Douglas H. Johnson, *The root causes of Sudan's civil war*, Kampala: The international African

ikut serta dalam gerakan pemberontakan untuk menuntut keadilan bagi masyarakat mereka. Pemberontakan dari The Torit Mutiny ini telah memberikan kesadaran bahwa mayoritas penduduk Sudan Selatan tidak menyetujui sistem pemerintahan yang diaplikasikan saat itu.<sup>32</sup>

Pada akhirnya gerakan pemberontakan *The Torit Mutiny* ini telah membangkitkan kesadaran warga negara Sudan di Selatan bahwa mereka tidak diberikan hak yang sama dalam pemerintahan Sudan secara keseluruhan. Sehingga pemberontakan pertama ini telah memunculkan gerakan - gerakan pemberontakan lainnya di daerah Selatan hingga akhirnya kelompok gerakan pemberontakan ini pun membesar. Kelompok ini pun membentuk pasukan gerilya bernama Anya Nya dan berhasil menjalin kontak dengan pihak asing untuk mendapatkan persenjataan yang mendukung pergerakan mereka. Dari hal tersebut, gerakan pemberontakan *The Torit Mutiny* menjadi sumber perang sipil pertama di Sudan, atau yang biasa disebut sebagai perang Anyanya pertama.<sup>33</sup> Dan pergerakan pemberontakan ini sudah jauh berbeda dari gerakan The Torit Mutiny, hal ini dikarenakan pergerakan ini terdiri dari berbagai etnis yang ada di Sudan Selatan dan juga adanya dukungan persenjataan serta bantuan dari pihak asing.

Adanya bantuan Asing dan juga dukungan yang didapat menyebabkan terbentuknya banyak pergerakan yang dilakukan oleh gerakan - gerakan

---

<sup>32</sup>. Focus On South: Jaafar Nimeiri, the Untrustworthy President, <http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3171>, diakses pada tanggal 8 februari 2012.

<sup>33</sup>. The "New Sudan," vision and its effects on Southern Sudanese unification, <http://www.southsudannewsagency.com/opinion/analyses/the-new-sudan-vision-and-its-effects-on-southern-sudanese-unification>, diakses pada tanggal 8 februari 2012.



pemberontak untuk menentang pemerintahan yang didominasi oleh Sudan Utara saat itu dan menyebabkan beragam kelompok gerakan pemberontakan tersebut tidak mewakili satu suara, dimana hal tersebut akan semakin mempersulit upaya – upaya untuk melakukan negosiasi akibat dari adanya perbedaan pendapat, ataupun latar belakang etnis yang akan menghambat proses negosiasi yang diinginkan. Dan pada Januari 1971 untuk menyatukan gerakan – gerakan yang mempunyai keinginan yang sama tersebut, Joseph Lagu mengumpulkan dan menyatukan semua kelompok gerakan pemberontakan kedalam sebuah gerakan yang disebut SSLM (*Southern Sudan Liberation Movement*) atau disebut Gerakan pembebasan Sudan Selatan. Sebuah gerakan pemberontakan yang harus diperhitungkan keberadaannya. Pada akhirnya gerakan SSLM ini diakui sebagai organisasi yang masuk dalam aktor negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat dari pemberontakan yang telah berlangsung sejak tahun 1955.

Negosiasi di konferensi tingkat tinggi antara delegasi dari SSLF/ SSLM dan pemerintah Sudan pun dilaksanakan di Addis Ababa pada Februari 1972. Awalnya kedua belah pihak tidak sepakat, dimana Selatan menuntut diterapkannya negara federal dengan pemerintah Selatan terpisah dan tentara atau angkatan bersenjata hanya akan digunakan di Selatan untuk menyelesaikan ancaman – ancaman eksternal ke wilayah Sudan. Akan tetapi perjanjian tersebut tetap berjalan dan dilaksanakan karena gerakan AnyaNya yang dipimpin oleh Joseph Lagu tersebut semakin melakukan gerakan pemberontakan yang bergerak

semakin intensive.<sup>34</sup> Dan pada tahun 1972 itu juga, dibuatlah perjanjian antara pemerintahan pusat dan SSLM. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan *The 1972 Addis Ababa Agreement* yang ditandatangani oleh Presiden Sudan saat itu yaitu Presiden Jafaar Muhammad An-Numeiry dan pemimpin gerakan pemberontak AnyaNya yaitu Joseph Lagu dan dengan adanya perjanjian tersebut maka berakhirilah perang sipil pertama di Sudan yang terjadi dari tahun 1955 sampai pada tahun 1972.

Perjanjian Addis Ababa yang ditandatangani saat itu berhasil menghentikan atau lebih tepatnya mengakhiri untuk sementara perang sipil pertama tersebut. Perjanjian tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan perselisihan atau konflik antara kedua wilayah. Banyak terjadi permasalahan – permasalahan lain setelah penandatanganan perjanjian, dimana permasalahan tersebut mencakup adanya sikap saling curiga dan tidak adanya kepercayaan diantara pasukan bersenjata Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah di integrasikan menjadi satu kesatuan pasukan militer Sudan seperti yang terdapat dalam perjanjian.<sup>35</sup> Hal ini disebabkan banyaknya anggota militer yang memegang jabatan tinggi dan penting adalah orang – orang yang berasal dari Sudan Utara.

Kegagalan tersebut juga disebabkan oleh adanya perbedaan perkembangan ekonomi yang tidak setara antara kedua wilayah. Dimana dalam hal perjanjian tersebut Sudan Selatan dikatakan berhak atas pemberlakuan otonomi daerahnya, dalam artian Sudan Selatan mendapatkan atau memiliki hak untuk

---

<sup>34</sup> HISTORY OF SOUTHERN SUDAN (HOSS), The Southern Regional Government 1972-1983, <http://pachodo.org/latest-news-articles/pachodo-english-articles/1749-history-of-southern-sudan-hoss>, diakses pada tanggal 6 Februari 2012.

<sup>35</sup> Douglas H. Johnson, *The root causes of Sudan's civil war*, Kampala: The international African

mengembangkan perekonomian regionalnya sendiri dan juga Sudan Selatan bisa mendapatkan bantuan untuk pengembangan wilayah berupa insentif finansial dari pemerintah pusat. Akan tetapi walaupun perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatanganinya, perjanjian tersebut hanyalah tinggal perjanjian yang tidak direalisasikan oleh pemerintah pusat.

## **2. Perang sipil kedua (1983-2005)**

Perang sipil kedua dimulai pada tahun 1983, konflik ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan masyarakat Selatan terhadap penerapan perjanjian Addis Ababa yang telah disepakati pada tahun 1972. Masyarakat Selatan merasa pemerintah pusat tidak melaksanakan isi – isi perjanjian tersebut dan bahkan lebih sering melanggar perjanjian. Gagalnya integrasi militer menjadi salah satu penyebab dimulainya pemberontakan menentang pemerintah pusat serta diabaikannya pengembangan ekonomi wilayah tersebut dan juga otonomi daerah yang telah diberikan kepada wilayah Selatan. Bahkan pemerintah pusat yang saat itu adalah Ja'far an Numaeri melakukan eksplotasi minyak yang terdapat di wilayah Selatan secara sepihak sehingga hal tersebut hanya menguntungkan pihak – pihak di wilayah Utara.<sup>36</sup>

Perang sipil kedua ini bukan hanya dimulai karena hal – hal diatas, akan tetapi juga dikarenakan adanya penerapan hukum Islam oleh pemerintahan saat itu. Presiden yang saat itu sedang menjabat benar – benar menerapkan Islamisasi

---

<sup>36</sup>. Perang Sipil Sudan, Perang Saudara Terpanjang di Afrika ( bagian 2 ), <http://republik-tayvan.blogspot.com/2011/07/perang-sipil-sudan-perang-saudara-07.html>, diakses pada tanggal 8

ke seluruh wilayah Sudan.<sup>37</sup> Islamisasi dengan menerapkan hukum Islam yang kemudian disebut hukum syariah ini diaplikasikan bukan hanya di daerah Sudan Utara yang mayoritas penduduknya adalah Islam tetapi juga di Sudan Selatan, yang memiliki kepercayaan yang berbeda masalah agama. Penerapan tersebut banyak mendapatkan protes dari masyarakat wilayah Selatan yang mayoritas adalah non Muslim dan bahkan masyarakat Muslim sekuler dari Utara pun ikut memprotes penerapan hukum tersebut. Walaupun banyak mendapat protes terhadap penerapan hukum tersebut, akan tetapi pemerintah yang memegang kekuasaan saat itu tidak mengacuhkannya dan tetap menerapkan hukum syariah tersebut. Bahkan pemerintah – pemerintah selanjutnya tidak menghapuskan Hukum Syariah dan hanya mengubah metode pengaplikasian dari hukum tersebut.<sup>38</sup>

Dengan dasar kekecewaan terhadap pemerintah pusat, akhirnya keinginan untuk melakukan pemberontakan kembali menguat untuk menentang pemerintah pusat melalui SPLA/M yang dipimpin oleh John Garang. Banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan penerapan hukum syariah tersebut menyebabkan pemerintahan Numeiri dijatuhkan. Selain masalah Islamisasi itu. Masa pemerintahan Numeiri merefleksikan masa kejatuhan ekonomi paling mengkhawatirkan di Sudan. Hingga akhirnya pemerintahan Ja'faar Numeiri di kudeta pada tahun 1985.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>. Referendum Penutup Konflik Sudan, <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/403-referendum-penutup-konflik-sudan>, diakses pada tanggal 8 Februari 2012.

<sup>38</sup>. The legal system: Sudan, <http://countrystudies.us/sudan/65.htm>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2012.

<sup>48</sup>. PROLONGED WARS: THE WAR IN SUDAN, <http://www.fas.org/irp/world/para/docs/97-0588.pdf>, diakses pada tanggal 8 Februari 2012.

Setelah digulingkannya Ja'far an Numeiri maka dimulailah pemilihan umum pada tanggal 1986 dan Sadiq al Mahdi terpilih sebagai perdana menteri saat itu. Sejak masa pemerintahan Sadiq, faktor eksternal banyak membentuk kebijakan politik dalam negerinya. Walaupun pasukan militer Sudan berada dalam posisi yang sangat kuat saat kepemimpinan karena banyaknya pemasukan persenjataan dan bantuan yang diperoleh dari pihak asing. Akan tetapi pemerintahan Sadiq al Mahdi sangat lemah dengan banyaknya masalah – masalah yang muncul kemudian.<sup>40</sup> Dimana korupsi, persaingan pribadi dalam pemerintahan, banyaknya skandal dan ketidakstabilan yang terjadi pada masa pemerintahan Sadiq.

Pemerintahan baru tersebut mencabut Keputusan Presiden Numairi 1983 dan membuat tawaran yang signifikan lainnya yang bertujuan untuk mendamaikan utara dan selatan tetapi tidak membatalkan apa yang disebut September Law yang diterapkan oleh rezim Nimeiri yang dikenal dengan sebutan Hukum Syariah. Pada bulan Mei 1986, pemerintah pusat melakukan negosiasi damai dengan SPLA, yang dipimpin oleh John Garang. Pada tahun itu SPLA dan sejumlah partai politik Sudan bertemu di Ethiopia dan menyetujui deklarasi Dam Koka. Dalam deklarasi tersebut kemudian menghasilkan beberapa prasyarat gencatan senjata. Diantaranya adalah penghapusan hukum Syariah, menghilangkan aliansi militer dengan negara – negara lain dan mengadakan konferensi pembentukan konstitusi

---

<sup>40</sup>. SADIQ AL MAHDI: <http://countrystudies.us/sudan/28.htm>. Diakses pada tanggal 8 Februari

dasar.<sup>41</sup> Pemerintah pusat menyetujui prasyarat yang disampaikan oleh pihak SPLA/M pada tahun 1989, setelah sebelumnya menyetujui rencana perdamaian yang menyangkut penghapusan pakta militer dengan Mesir dan Libya, membekukan hukum Islam, mengakhiri keadaan darurat dan gencatan senjata pada tahun 1988.<sup>42</sup>

Dengan adanya Negosiasi damai yang dilakukan oleh rezim Sadiq al Mahdi tersebut, akhirnya kehilangan banyak dukungan khususnya dukungan dari pihak militer Sudan. Komandan Omar Al-Bashiir menentang keputusan Sadiq untuk melakukan negosiasi dengan Sudan Selatan. Pihak militer merasa bahwa melakukan negosiasi dengan SPLA/M itu bukanlah permasalahan dasar tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila ada prasyarat yang diajukan oleh pihak SPLA/M. Perbedaan pendapat tersebut kemudian menimbulkan disintegrasi antara pemerintahan pusat dan militer yang menyebabkan terjadinya kudeta militer pada Juni 1989. Kudeta tersebut berhasil menjatuhkan Sadiq al Mahdi dari posisi perdana menteri. Dan sejak saat itu, Omar Al-bashiir menduduki posisi tertinggi Negara sebagai pengganti Sadiq al Mahdi.

Masa kepemimpinan Omar Al-Bashiir tergolong pemerintahan yang otoriter dan keras. Dimana Omar Bashir terus menerus melakukan razia di berbagai daerah Sudan Selatan dan menangkap orang – orang yang dicurigai tidak mendukung pemerintahan saat itu. Pemerintah pusat bahkan memperkuat

---

<sup>41</sup>. PRESS RELEASE FROM THE BERGEN FORUM ON THE MANAGEMENT OF CRISIS IN THE SUDAN, <http://www.fou.uib.no/fd/1996/f/712001/annex1.htm>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2012.

<sup>42</sup>. Sudan second civil war, [www.globalsecurity.org/military/world/war/Sudan\\_civil\\_war2.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/war/Sudan_civil_war2.htm)

hubungan dengan Libya, Iran, dan Irak, memperkuat hukum Islam yang sebelumnya sempat akan dibekukan melalui perjanjian damai SPLA/M dengan pemerintahan Sadiq al Mahdi serta melarang adanya pembentukan partai oposisi. Pemerintah pusat juga tidak memperlihatkan inisiatif baik untuk berdamai dengan gerakan pemberontak Sudan Selatan dan terus berusaha melakukan perang dengan mengalihkan bantuan darurat (terutama makanan) dari selatan yang dilanda kelaparan ke wilayah Sudan bagian Utara.<sup>43</sup>

Selain dikarenakan oleh sikap pemerintah yang tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah, adanya keterlibatan pihak atau negara luar dalam konflik internal di Sudan ini sangat berpengaruh dalam hal keberlangsungan serta arah konflik yang terjadi. Akan tetapi bukan hanya Omar Al-Bashiir yang menjadi satu-satunya aktor yang mendapatkan bantuan asing. Keelompok gerakan SPLA/M juga sering dan banyak mendapatkan dukungan dari pihak luar, salah satunya dari Ethiopia. Sejak berdirinya SPLA/M di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA/M, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan Utara dan Selatan. Bantuan yang paling berpengaruh terhadap dinamika peperangan sipil kedua adalah pasokan persenjataan dari pihak asing. Akan tetapi tidak selamanya SPLA/M diberikan bantuan perangkat persenjataan tanpa bayaran apapun dan seringkali persenjataan ini dapat di akses dengan mudah dari bantuan Ethiopia. Selain didukung oleh Ethiopia, John Garang dan SPLA/M juga didukung oleh negara-negara seperti Kuba, Uganda, Chad, terutama Israel dan Amerika

---

<sup>43</sup>. Sudan. <http://www.answers.com/topic/sudan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2012

yang telah memberikan persenjataan, serta pelatihan militer kepada anggota SPLA/M.<sup>44</sup> Pihak pemberontak terkadang menjadikan perangkat militer yang digunakan oleh pihak militer Sudan sebagai target pencurian jika perangkat persenjataan mereka mulai berkurang. Hingga kemudian kejadian tersebut menyebabkan pertempuran yang jauh lebih berdarah dibandingkan dengan perang sipil pertama Sudan.

Di masa pemerintahan Omar Al-Bashiir di awal tahun 1990an, terjadi perpecahan dan berbagai permasalahan internal dalam kelompok SPLA/M. Jumlah pasukan SPLA semakin bertambah dengan anggota –anggota yang mempunyai perbedaan latar belakang, menyebabkan terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat dalam organisasi tersebut. Beberapa masalah utama yang dihadapi SPLA/M sebagai sebuah organisasi saat itu adalah permasalahan finansial, strategi operasi militer, informasi aliansi eksternal, serta proses negosiasi perdamaian yang dikendalikan oleh beberapa individu dalam SPLA/M.

Permasalahan utama dalam SPLA/M bersumber pada ketuanya, yaitu John Garang. Adanya sistem akuntabilitas yang tidak dapat dipercaya oleh para anggota merupakan permasalahan kecil dibandingkan perspektif anggota terhadap ketua SPLA/M itu sendiri. John Garang banyak dianggap sebagai seorang diktator dan melakukan kebijakan yang kontroversial. Ditahun 1990-1991, mulai muncul gerakan yang mendukung kudeta John Garang. Gerakan kudeta tersebut diketuai

---

<sup>44</sup>. Perang Sipil Sudan, Perang Saudara Terpanjang di Afrika ( bagian 2 ), <http://republik-tayon.blogspot.com/2011/07/perang-sipil-sudan-perang-saudara-07.html>, diakses pada tanggal 10



oleh komandan senior Riek Machar, dan lam Akol.<sup>45</sup> Rencana kudeta tersebut telah disebarluaskan kepada keseluruhan anggota SPLA/M, juga lewat media radio demi mendapatkan banyak dukungan. Harapan kedua komandan tersebut adalah John Garang mundur dari posisinya. Kudeta tersebut tidak berhasil dan sebagai gantinya adalah adanya pembentukan Nasir Faction. kelompok ini bahkan melakukan peperangan dengan pasukan SPLA/M yang diketuai oleh John Garang. Pemerintah pusat mengetahui potensi kekuatan kelompok Nasir Faction kemudian memberikan bantuan perangkat persenjataan kepada kelompok tersebut, dimana pada akhirnya menyebabkan banyak nyawa yang melayang akibat peperangan antar kedua pihak tersebut. Namun kelompok Nasir Faction tidak dapat mengalahkan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh John Garang di SPLA/M. Dan dengan adanya gerakan - gerakan lain akibat dari perpecahan tersebut, hal kemudian membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pemberontak tersebut dan membuat konflik tersebut tidak terselesaikan serta menjadi melebar.

Usaha penyelesaian konflik sering dilakukan bukan hanya oleh kedua pihak (SPLA/M dengan Omar Al-Bashiir), namun juga ada campur tangan pihak luar. Pada tahun 1993 pemimpin dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya berusaha membentuk perjanjian perdamaian dan gencatan senjata antar kedua pihak, melalui organisasi IGAD (*Intergovernmental Authority for Development*).<sup>46</sup> Pada tahun 1994, IGAD berusaha mendorong proses dari deklarasi prinsip yang

---

<sup>45</sup> History of Sudan: Chronology, <http://www.sudanupdate.org/HISTORY/chron.htm>, Diakses tanggal 10 Februari 2012.

<sup>46</sup> A brief history of Sudan - part 2, [www.africanhistoryabout.com/ed/sudan/p/SudanHist3.htm](http://www.africanhistoryabout.com/ed/sudan/p/SudanHist3.htm)

mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam pembentukan perdamaian di Sudan. Pada awalnya Pemerintahan Sudan tidak menandatangani deklarasi tersebut tetapi pada tahun 1997 deklarasi tersebut pun ditandatangani. Hal ini disebabkan oleh selain adanya efek dari embargo yang dijatuhkan oleh Amerika pada tahun itu, terjadinya keterpurukan ekonomi juga menjadi salah satu penyebabnya, dimana adanya hutang luar negeri sebesar 16,3 miliar dollar dan juga adanya kerugian akibat dari perang yang melawan SPLA/M.

Deklarasi prinsip tahun 1994 oleh IGAD merupakan fondasi dasar, beberapa elemen penting dalam perumusan sebuah perjanjian perdamaian di masa depan. Beberapa poin inti dalam deklarasi tersebut, diantaranya adalah mengakui bahwa Sudan merupakan negara multi-etnis sehingga membutuhkan sistem pemerintahan yang dapat menghargai kenyataan tersebut melalui implementasi pemerintahan demokratis yang menghargai perbedaan agama dan etnis. Partai-partai yang terlibat dalam konflik perlu merundingkan sebuah gencatan senjata, agar perang sipil kedua dapat segera dihentikan secepatnya. Pembagian sumber daya yang setara antar Sudan Selatan dan Sudan utara. Adanya konstitusi yang mengakui Hak Asasi Manusia rakyat Sudan, sehingga opresi oleh pemerintahan pusat dahulunya tidak terulang.<sup>47</sup> Perjanjian juga menyerukan tingkat otonomi untuk wilayah selatan dan hak menentukan nasib sendiri.

Pada tahun 2002 setelah deklarasi prinsip ditandatangani pada 1997, proses perdamaian dibawah perlindungan IGAD mulai terlihat signifikan. Lebih tepatnya tanggal 20 Juli 2002, para aktor-aktor yang terlibat dalam konflik perang sipil

---

<sup>47</sup>. Sudan Peace Process - 1993-2007, <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan->

Sudan kedua menandatangani sebuah protocol yang disebut sebagai *Machakos Protocol*, di Kenya. Protokol ini berisikan sebuah kerangka umum pemerintahan yang telah disetujui yang terdiri dari prinsip pemerintahan, proses transisi, serta struktur pemerintahan.<sup>48</sup> Dalam *Machakos Protocol*, perjanjian yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan deklarasi prinsip sebelumnya. Dimana, diantaranya memberikan hak kepada Sudan Selatan untuk menjalani sistem pemerintahan mereka sendiri, tanpa campur tangan dari Sudan utara. Memiliki hak untuk mengadakan referendum di masa yang mendatang, untuk menentukan bagaimana nasib Sudan Selatan nantinya.

Setelah perang sipil atau perang bersaudara terus menerus terjadi di wilayah ini, pada akhirnya dengan adanya perjanjian tersebut prospek perdamaian di Sudan masa depan akhirnya bisa sedikit terlihat. Protokol ini merupakan pencapaian yang paling berbahaya bagi integrasi Sudan, ini dikarenakan kesepakatan ini dapat memicu keinginan bagi propinsi – propinsi dan daerah – daerah lainnya untuk menuntut hal yang sama dengan Sudan Selatan. Dengan kekejaman dan ketidakadilan yang masih terus menerus terjadi di wilayah Darfur, perjanjian tersebut tetap berjalan. Dan ini mengakibatkan berkembangnya masalah daerah – daerah marjinal seperti Nuba Mountain, Selatan Nil Biru, Sudan Timur dan Darfur itu sendiri. Dan terbukti setelah itu kemudian meletus konflik Darfur yang diantara tuntutan-tuntutannya adalah tuntutan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan Sudan Selatan. Sebenarnya konflik ini telah terjadi sejak tahun 1990an di kawasan ini khususnya setelah ditemukannya cadangan minyak yang sangat besar.

---

<sup>48</sup> IDPMS, *Background and Context of the Sudanese Civil War*, [www.idpms.org/press/pressroom/pressroom.htm](http://www.idpms.org/press/pressroom/pressroom.htm), Diskusi

Akibat ketidakmerataan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah pusat di Khartoum menimbulkan berbagai gerakan yang menuntut otonomi dan bahkan kemerdekaan, seperti halnya yang dituntut oleh Sudan Selatan.<sup>49</sup> Krisis Darfur mulai muncul di peta dunia ketika beberapa LSM internasional seperti *International Crisis Group*, *Human Watch International* dan *Amnesty International* menyebutkan munculnya pembantaian massal (genocide), pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran secara besar-besaran etnis Fur dan Massaleit di Darfur oleh milisi yang dikenal dengan nama Janjaweed.

Bersamaan dengan terus terjadinya konflik di wilayah Darfur tersebut, negosiasi perdamaian terus menerus berlanjut sampai kepada 19 November 2004. Dimana kedua pihak menandatangani sebuah deklarasi yang memberikan komitmen kepada kedua pihak untuk melakukan penyelesaian dari perjanjian perdamaian komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement*) sebelum Desember 2004. Dan akhirnya pada Januari 2005, sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pemberontak di Selatan dengan pemerintahan Sudan, mengakhiri perang saudara kedua yang telah berlangsung 21 tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemimpin SPLA, John Garang dengan Ali Osman Taha (wakil presiden Sudan). Perjanjian perdamaian komprehensif tersebut menyetujui gencatan senjata antar kedua pihak.

Perjanjian Perdamaian Komprehensif atau biasa disebut Naivasha Agreement merupakan hasil dari 3 tahun negosiasi perdamaian antar kedua pihak, yang difasilitasi oleh IGAD. Perjanjian tersebut berisi beberapa hal seperti tindak

---

<sup>49</sup>. Konflik Darfur, Sudan. URL: <http://politik.kompasiana.com/2010/07/15/konflik-darfur-sudan/>

lanjut dari pasukan militer setiap kubu, otonomi daerah, kekayaan minyak, isu ekonomi, administrasi, serta Hukum Islam. Setelah 6 tahun setelah pengaplikasian perjanjian tersebut, maka akan diputuskan kelanjutan negara Sudan Selatan melalui sebuah referendum. Rakyat Sudan akan diberikan pilihan setelah 6 tahun integrasi pemerintahan kedua pihak, apakah rakyat Sudan Selatan menginginkan persatuan, atau kemerdekaan.

Dalam perjanjian Naivasha, pasukan militer dari Sudan Selatan dan Utara tetap menjadi unit militer yang terpisah satu sama lain. Langkah pertama adalah penarikan 91.000 pasukan pemerintahan dari Sudan Selatan selama 2 setengah tahun, sedangkan pihak SPLA punya waktu 8 bulan untuk menarik pasukannya dari wilayah Sudan Utara. Direncanakan akan ada integrasi militer antar kedua pihak, dengan jumlah tertentu. Walaupun akan diintegrasikan, masing-masing unit militer akan berada dalam komando yang berbeda, hanya berada dalam markas yang sama. Hasil referendum 6 tahun berikutnya, jika menghasilkan persatuan, maka integrasi militer akan dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak.<sup>50</sup> Otonomi dalam perjanjian Naivasha diberikan kepada Sudan Selatan. Otonomi ini bersifat sementara karena masyarakat Sudan Selatan akan dengan sendirinya memilih untuk mengetahui apakah mereka menginginkan otonomi atau mereka menginginkan kemerdekaan dari Sudan dan kemudian membentuk Republik Sudan Selatan. Selama 6 tahun tersebut, penghasilan dari industri minyak yang ada di Sudan Selatan akan dibagi dua.

---

50. Sudan Comprehensive Peace Agreement (CPA), 9 January 2005.  
[www.usc.org/office/peace/Sudan/darfur/naivasha.htm](http://www.usc.org/office/peace/Sudan/darfur/naivasha.htm). Diakses tanggal 12 Februari 2012.

Permasalahan yang paling utama dalam mendapatkan kesepakatan bersama selain masalah pasukan bersenjata masing-masing pihak adalah masalah administratif, serta penerapan hukum di Sudan selama 6 tahun tersebut. Disepakati bahwa sistem administratif akan dibelah menjadi 70:30. Kepala negara akan diduduki oleh Omar Al-Bashiir, dengan John Garang sebagai wakil dari kepala negara Sudan. Hukum Syariah akan tetap diterapkan di Sudan utara. Perombakan konstitusi akan dilakukan, untuk memastikan bahwa semua warga non-muslim tidak akan terikat pada Hukum Syariah yang bertolak belakang dengan kepercayaan mereka. Dan sejak saat itu, perjanjian Naivasha diterapkan. Selama 6 tahun integrasi pemerintahan SPLA/M dengan pemerintahan pusat, beberapa konflik hampir pecah. SPLA/M mengundurkan diri dari perjanjian tersebut yang disebabkan oleh adanya salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan pusat. Walaupun sempat memanas beberapa bulan, akhirnya redam setelah pasukan Sudan Utara di Selatan ditarik kembali pada tahun 2008. Walaupun tidak sempurna, *Comprehensive Peace Agreement/* Naivasha telah berhasil mengakhiri perang yang berlangsung selama 21 tahun.

Tidak adanya keinginan apapun untuk menghapuskan atau setidaknya membatasi penerapan hukum Syariah dari setiap pemerintahan sebelumnya menyebabkan para kelompok pemberontak yang ada di seluruh Sudan memiliki alasan untuk tetap melakukan pemberontakan sampai hukum tersebut dihapuskan. Adanya dukungan dari masyarakat lokal pada gerakan yang dilakukan SPLA/M serta kelompok pemberontakan lainnya juga ikut serta berkontribusi terhadap

pemerintahan perantara yang terdidi. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah

pasukan SPLA/M, serta akses ke berbagai daerah sebagai markas, maupun tempat peperangan yang baru.

Setelah terjadinya perjanjian Naivasha tersebut, walaupun dikatakan dapat mengakhiri perang sipil dan saudara yang telah terjadi bertahun – tahun, akan tetapi konflik tetap saja terjadi antara kedua belah pihak. hal ini disebabkan oleh salah satunya perjanjian tersebut dirasa tidak menjangkau semua kelompok pemberontak yang ada, walaupun intensitas pemberontakannya lebih kecil daripada pemberontakan yang dilakukan oleh SPLA/M, tetap saja konflik tidak dapat dihindari. Dan juga adanya permasalahan tentang kota Abyei dan masih banyak lagi permasalahan lain yang menyebabkan konflik – konflik antara kedua kubu yaitu antara pemerintah pusat dan pemberontak. Hingga pada akhirnya pada tanggal 9 Juli 2011 seluruh rakyat Sudan selatan melakukan referendum yang telah disepakati di perjanjian sebelumnya dan hasilnya adalah pemisahan diri Sudan Selatan dari Negara Sudan serta menjadi negara baru ke 103 di dunia